



Komersialisasi dan Tanggung Jawab Pendidikan: Sekelumit Pembicaraan

Wan Anwar *)

*) Penulis adalah Magister Humaniora (M.Hum.) lulusan S-2 Ilmu Sastra FIB Universitas Indonesia. Kini mengajar sastra di Jurusan Bahasa dan Seni FKIP Universitas Tirtayasa (Untirta) Banten, dan menjadi editor majalah sastra *Horison*. Bukunya yang sudah ditulis: *Sebelum Senja Selesai* (2002), *Sepasang Maut* (2004), *Kuntowijoyo dan Dunianya* (2006).

Abstract: One of crucial pictures of our education recently is expensive education expense. This happen parallel with pragmatism mental on every side of social life. Commercialization and capitalism often become cause of human values destruction that actually should to be preserved by education. Therefore, we have to do awareness movement to change attitude and action of education's actor. BHP and BHMN (State's owner legal institution) status, that giving autonomy to education institution to raise fund from community shouldn't accentuate commercialization of education at school or campus. Its also prevail on entrepreneurial university that its network source from global market capitalism expansion. School and campus must revitalize its public and humanity responsibility to independent, quality, creative, and responsible human. According to Kuntowijoyo, education task and responsibility is on humanizing human (humanization) effort, liberation, and spiritualizing human (transcendent). **Keywords:** *pragmatism, education commercialization, capitalism, BHP-BHMN, entrepreneurial university, dehumanization, awareness movement, and humanization-liberation-transcendent.*

Pengantar

Salah satu potret dunia pendidikan yang belakangan ini menggelisahkan adalah mahalnnya biaya pendidikan. Sementara itu, jumlah orang miskin semakin bertambah, jurang kaya-miskin tambah menganga. Rakyat miskin yang “dilumpuhkan” oleh berbagai kebijakan dan struktur negara, akhirnya harus pula dilindas oleh dunia pendidikan. Hal ini berarti, langsung tidak langsung, pengelola negara mengkhianati rakyatnya, si kaya menghisap si miskin, kaum terpelajar menindas orang-orang yang tidak mampu mengenyam pendidikan.

Berkaitan dengan pernyataan di atas, perlu ditegaskan bahwa masalah penting dalam dunia pendidikan yang harus terus dibicarakan adalah pergumulan dua kekuatan tidak terhindarkan: kuasa yang menindas dan perjuangan manusia untuk bebas! Dalam pergumulan itulah, dua kenyataan mengemuka: pendidikan kita terpuruk, meskipun “idealisme” masih tampak bergelora dalam diri sebagian pelaku atau pengelolanya. Sejumlah potret carut-marut dunia pendidikan tidak sulit ditunjukkan dan berbagai kritik terhadap kenyataan itu hingga kini terus bergulir. Inilah yang cukup melegakan, masih ada sekelompok orang yang menghasratkan perbaikan di tengah kebanyakan orang tenggelam di dalam rawa-rawa kemapanan.

Pragmatisme dan Komersialisasi



Kecenderungan mahalny biaya pendidikan menimbulkan persoalan tersendiri di masyarakat, terutama di kalangan rakyat miskin. Bagi orang miskin, pendidikan menjadi “hantu” yang mengganggu harapan dan impiannya. Sejumlah kisah tragis terjadi di sekitar kita: anak gantung diri karena malu belum bayar SPP, gadis ingusan menjadi pelacur karena putus sekolah, remaja-remaja tanggung menjadi anak jalanan atau preman karena negara (pemerintah pusat maupun daerah) tidak mengamalkan undang-undang. Sementara itu, dengan dalih meningkatkan kualitas (kenyataannya sering hanya memperkaya diri pengelola pendidikan!) hampir semua sekolah dan perguruan tinggi, negeri maupun swasta, memungut aneka rupa bayaran. Komersialisasi pendidikan tidak lagi terelakkan. Dalam kondisi demikian hanya anak-anak orang kayalah yang nyaman bersekolah-kuliah karena komersialisasi langsung tidak langsung dikendalikan hukum besi ekonomi.

Dalam hal ini, Azyumardi Azra menganggap sistem pendidikan kita pincang. Rakyat kecil sukar menembus jaring-jaring dunia pendidikan. Dengan bersandar pada pemikiran Paulo Freire, Ivan Illich, dan Everett Reimer, Azyumardi mengatakan bahwa lembaga pendidikan formal akhirnya hanya alat untuk menyebarluaskan penindasan terhadap rakyat miskin. Hal ini mengakibatkan rakyat kehilangan kesadaran, baik terhadap diri sendiri maupun penindasnya. Rakyat dibuat pasrah oleh “nasib”, terpenjara dalam “*culture of silence*” (kebudayaan bisu).¹

Ada banyak faktor yang menyebabkan pendidikan kita kurang menghargai orang miskin dan membuatnya terjebak pada arus komersialisasi. Salah satu faktor itu adalah mental pragmatisme yang menghinggapi manusia dan masyarakat. Sebuah masyarakat yang dihuni manusia pragmatis dengan sendirinya menciptakan tatanan sosial-budaya-politik pragmatis. Dalam kesadaran manusia pragmatis, uang (*cash value*) melandasi seluruh sikap dan tindakannya. Sikap dan tindakan manusia akan dikatakan “benar” dan “berguna” jika langsung menghasilkan uang-material. Itu sebabnya “ukuran sukses” seseorang, martabat seseorang, eksistensi seseorang, amat tergantung pada jumlah uang yang dimilikinya. Dunia pendidikan tidak sanggup menghindarkan diri dari logika itu. Hampir semua kebijakan pengelolaan pendidikan tidak luput dari pertimbangan uang. Inilah sebab komersialisasi pendidikan yang didukung ekspansi kapitalisme global, yang merambah berbagai sendi kehidupan.

Istilah “pragmatis” berakar pada filsafat pragmatisme. Ketika merumuskan pragmatisme, William James menyebut dua kata kunci: “tindakan” dan “konsekuensi praktis”. Menurut pragmatisme, tindakan harus dipahami dengan melihat konsekuensi praktis yang dihasilkannya.² Mengikuti Reley Woodbridge, Haniah mengatakan, pragmatisme adalah filsafat yang mementingkan “kepraktisan” dan “kerja keras” dengan kriteria utama “sukses” material. Dengan kriteria itulah pragmatisme dianggap filsafat bisnis-materialistis.³ Dalam perbandingannya dengan pemikiran Islam, Kuntowijoyo mengatakan bahwa kebenaran pragmatisme berbeda dengan kebenaran Islam karena dalam pandangan Islam kebenaran adalah apa saja yang datang dari Tuhan, baik berguna maupun tidak dalam kehidupan praktis sekarang ini. Itulah sebabnya konsep kemajuan (bisnis, ilmu, budaya, dan teknologi) dalam Islam berbeda dengan kemajuan dalam pandangan pragmatisme.⁴



Demikianlah pragmatisme adalah faham yang mendasari manusia untuk bertindak demi konsekuensi praktis-materialistis. Amerika sering disebut contoh tipikal bangsa yang menganut pragmatisme. Itu sebabnya orang Amerika gila kerja, berorientasi hasil, materialistik, yang kemudian melahirkan manusia “*men of affairs-business men*” alias kapitalis dengan kekuatan uang dan materialnya.

Gaya hidup orang Indonesia cenderung mengadaptasi gaya hidup (*life style*) orang Amerika. Oleh karena itu, sikap pragmatis menghinggapi manusia dan masyarakat Indonesia. Kunjungan para politikus ke perkampungan orang miskin, misalnya, seringkali didasarkan pada pertimbangan pragmatis. Jika kunjungannya penting untuk pemilu (suara = kuasa = uang), politikus pragmatis bersemangat melakukannya. Begitu pula media massa (cetak, audio, audio-visual), yang menayangkan berita, opini, dan hiburan demi pertimbangan pragmatis uang. Bahkan, orang yang mendirikan sekolah-perguruan tinggi tidak lepas dari pertimbangan pragmatis untuk mencari keuntungan material sebanyak-banyaknya. Itu sebabnya, kemudian orang bersekolah-kuliah bertujuan pragmatis: mencari kerja, lalu menumpuk harta dan kekayaan.

Sudah dikatakan mental pragmatis turut memicu komersialisasi, termasuk dalam dunia pendidikan. Para pejabat di departemen-dinas pendidikan, pengelola pendidikan (negeri atau swasta), pendidik, dan peserta didik, hingga orangtua siswa-mahasiswa tidak urung dihindangi wabah pragmatisme. Uang sebagai “konsekuensi praktis” yang memotivasi seseorang dan mengubah mental para pelaku atau pengelola pendidikan. Praktik pendidikan kemudian dipahami sebagai aktivitas untuk mengejar hasil-hasil praktis-ekonomis semata. Uang mereduksi tujuan pendidikan dan tujuan hidup manusia secara luas di bumi ini. Dimensi kemanusiaan lahir-batin, luas, dan mendalam, baik segi intelektual, emosional, dan spiritual terabaikan.

Selain berpijak pada pragmatisme, uang merupakan sisi penting kapitalisme. Menurut Ania Loomba, kedudukan uang di tengah masyarakat kapitalisme, otomatis menggantikan kedudukan manusia, hubungan-hubungan manusiawi, dan akhirnya membendakan (*reifikasi*) manusia.⁵ Gerak manusia, masyarakat, dan dunia pendidikan tidak pelak lagi dikendalikan kapitalisme. Dunia pendidikan akhirnya cenderung menjadi bagian ekspansi bisnis industri kapitalisme. Di titik inilah tugas dan tanggung jawab pendidikan perlu dipertanyakan dan dikaji ulang!

Dalam kehidupan berbangsa sekarang ini, nyatanya ekonomilah (nilai uang) yang mengendalikan manusia dan masyarakat. Para politikus, pengusaha, intelektual akademisi, pejabat dan birokrat, bahkan tokoh agama dan masyarakat berkolaborasi melakukan tindakan pragmatis-komersialis untuk merebut jabatan yang ujung-ujungnya uang. Dengan kekuatan uang, para pengusaha berhasil menduduki jabatan-jabatan politik (pimpinan partai) ataupun jabatan kenegaraan. Kolaborasi semacam itu terjadi karena uang menggantikan kedudukan, kesadaran, dan nilai-nilai kemanusiaan.

Presiden Soekarno, dengan visi kebangsaannya, sudah melihat tanda-tanda bahaya ini. Di tahun 30-an beberapa kali ia mengkritik kapitalisme dan menyimpulkan “*borjuisme harus ditolak, kapitalisme harus dilawan!*” Akan tetapi, meski Soekarno berpendapat demikian, kapitalisme bergulir dan



mencapai puncaknya di zaman Soeharto yang memberikan aneka macam proteksi, subsidi, keringanan, dan kemudahan, termasuk *tax-holiday* (bebas pajak) yang merugikan rakyat dan negara.⁶

Di era kapitalisme yang ditandai banjir iklan berbagai produk industri dan hiburan di media massa, hasrat konsumsi dan histeria gaya hidup membelit mental manusia dan masyarakat. “Mayoritas yang diam” (istilah Baudrillard) tidak berdaya di hadapan objek-objek “*simulacrum*” (kepalsuan komoditas) yang setiap hari muncul di televisi. Hasrat konsumtif dan kegandrungan gaya hidup menjadi watak masyarakat kapitalisme. Sekarang ini, bukan lagi kesadaran manusia yang menggerakkan kehidupan, melainkan benda-benda produk industri yang lalu-lalang setiap hari.⁷ Dalam beberapa hal, mental pragmatis berubah menjadi skizoprenia, di mana kebiasaan mengkonsumsi produk industri tidak lagi didasarkan pada nilai guna, melainkan citra dan gaya hidup penuh mimpi dan ilusi. Itu sebabnya banyak orang sekolah-kuliah, bahkan “membeli gelar akademik”, selain untuk kepentingan bisnis dan jabatan, didasarkan pada citra dan gaya hidup.

Permasalahan yang diuraikan di atas, jika tidak disikapi kritis, bukan tidak mungkin akan menyapakan manusia dan seluruh nilai kemanusiaannya. Manusia lalu menjadi mesin tanpa karakter: tubuh-tubuh tenggelam di mall, histeris memuja konsumsi, serakah tidak terpuaskan, mementingkan diri sendiri, gila dan merana, penuh mimpi dan ilusi, sakit dan tidak terobati. Ross Poole, dosen filsafat moral di Macquaire University, ketika membahas moralitas di tengah “masyarakat komersial”, mengkritik kapitalisme: apa yang dicapai kapitalisme (produksi-konsumsi-komersialisasi) sesungguhnya bukanlah kepuasan, melainkan frustrasi, bukanlah kreativitas dan ketenangan, melainkan repetisi tanpa akhir, yang sejenak diselang-selingi kenikmatan sesaat. Modernitas membutuhkan moralitas, tetapi pada saat bersamaan kapitalisme memustahilkannya.⁸

Kapitalisme muncul pada abad ke-17 sebagai bagian dari proyek modernisme dan kolonialisme yang melahirkan imperialisme. Meski kolonialisme politik-formal sudah tidak ada, tetapi menurut Loomba dalam *Colonialism/ Postcolonialism* (2000), neo-imperialisme/neo-kolonialisme terus berlangsung dilakukan negara-negara maju melalui kontrol dan ekspansi ekonomi global. Dalam konteks ini, Aime Cesaire, aktivis poskolonialisme Afrika, mendakwa kapitalisme, selain mengeksploitasi manusia, membendakan manusia terjajah sekaligus penjajahnya.⁹ Kehendak dan perjuangan negara-negara dunia ketiga untuk membebaskan diri dari aneka macam “penjajahan” (politik, ekonomi, budaya) mendapat tantangan besar dari neo-imperialisme (kapitalisme) dalam bentuk ekspansi pasar kapitalisme.

Secara ekonomis, praktik kolonialisme-imperialisme di zaman dahulu dan praktik neo-kolonialisme/neo-imperialisme (kapitalisme) di zaman sekarang, lebih banyak merugikan negara-bangsa dunia ketiga. Sebagaimana ditandaskan Frantz Fanon dalam *The Wretched of The Earth* (1963), negara-negara dunia ketigalah yang membuat bangsa Eropa-Amerika kaya dan mewah. Melalui praktik kolonialisme-imperialisme, kekayaan negeri-negeri dunia ketiga mengalir ke dalam kas negara-negara Eropa/ Amerika.¹⁰



Negeri-negeri dunia ketiga, termasuk Indonesia, kini menghadapi masalah kemiskinan ekonomi dan hilangnya nilai-nilai kemanusiaan sebagai akibat negatif neo-imperialisme/neo-kolonialisme yang menyusup dalam kapitalisme. Lalu apakah yang bisa dilakukan lembaga pendidikan dalam menghadapi kenyataan seperti itu? Apakah akan membiarkan manusia tenggelam dalam dehumanisasi? Adakah peluang pendidikan untuk menjadikan dirinya sebagai budaya tandingan (*counter-culture*) bagi gerak laju kapitalisme?

Selain menghadapi masalah korupsi, fasilitas pembelajaran serba kurang, mental pragmatis pejabat dan pengelola pendidikan, komersialisasi pendidikan merupakan masalah gawat pendidikan kita. Apakah kita akan membiarkan pendidikan hanya sebagai “pabrik” ijazah bagi mereka yang akan berdagang atau berpolitik sambil berdagang? Apakah pendidikan hanya sekadar mesin yang memproduksi lulusan untuk menjadi “engsel” pembangunan? Apakah pendidikan hanya alat legitimasi bagi orang berdasi untuk memperebutkan “kursi”? Apakah pendidikan sekadar jalan untuk menumpuk harta dan kekayaan? Apakah pendidikan tidak akan dan tidak sanggup mengkritisi kapitalisme yang memperluas dehumanisasi?

Dunia pendidikan kita mengidap banyak penyakit. ITB, UI, UGM, IPB, dan kampus-kampus terkemuka lainnya boleh saja menganggap dirinya berhasil meluluskan sarjana “siap pakai” di masyarakat. Akan tetapi pertanyaannya, “siap pakai” untuk apa dan dalam konteks apa? Apakah yang sudah dilakukan para sarjana “siap pakai” itu dalam konteks kemanusiaan, pemihakan kepada kaum miskin, dan penyelamatan peradaban? Sudahkah kampus-kampus tersebut menghasilkan teknologi “ramah kemanusiaan” yang kemudian dimanfaatkan rakyat banyak? Sudah seriuskah berperan serta dalam menangani laut dan perairan di negeri ini,¹¹ hutan dan pertanian yang setiap saat dirampok para pengusaha? Sudahkah berperan serta dalam upaya-upaya melenyapkan kesenjangan ekonomi (kaya-miskin), meningkatkan kualitas dunia peradilan, memecahkan dan menangani masalah sosial yang melahirkan kekerasan dan kejahatan? Jangan-jangan para sarjana “siap pakai” itu hanya jenis manusia pintar mencari uang, menumpuk harta dan kekayaan? Jangan-jangan perguruan tinggi hanya memproduksi pengangguran dan manusia-manusia yang terasing dari kehidupan?

Sebagai bangsa, kesalahan kita adalah sikap tergesa-gesa, tetapi tidak seksama. Di zaman Soeharto, pemerintah tergesa-gesa mengadaptasi teknologi tinggi sehingga teknologi agraris terlupakan. Pemerintah tergesa-gesa ingin kaya sehingga perhatian terhadap ekonomi melejit meninggalkan masalah sosial dan humaniora. Bukan hanya pemerintah, aparat birokrasi, pelaku industri, dan pengelola pendidikan, orang-orang pun tergesa ingin kaya sehingga apapun ditempuh meski melanggar etika. Sebagai bangsa, kita tidak belajar kepada alam sebagaimana dikonsepsikan pendiri INS Kayutanam Moh. Sjafei. Kita tidak mau menggali dan menghayati kearifan lokal, kekayaan khasanah intelektual dan spiritual yang pernah digagas intelektual dan orang-orang bijak di negeri ini.

Oleh karena serba ingin tergesa, bangsa kita menjadi bangsa pragmatis-komersialis, termasuk dalam mengelola pendidikan. Seakan-akan segala sesuatu harus dikelola dan dipikirkan untuk dijual agar menjadi uang. Tidak heran bila hutan dibabat demi uang. Barang tambang dieksploitasi demi uang.



Jabatan politik-kenegaraan dijadikan pabrik uang. Gedung-gedung bersejarah dijual kepada pengusaha untuk dijadikan mall demi uang. Orang-orang membentuk partai demi uang, massa demonstrasi demi uang. Orang-orang sekolah-kuliah demi uang. Pejabat dinas pendidikan membuat proyek demi uang. Tokoh masyarakat mencalonkan diri jadi gubernur-bupati demi uang. Pengelola sekolah-kampus menerapkan manajemen yang berorientasi uang. Guru dan dosen melanggar etika akademik demi uang.

Sikap pragmatis dan komersialisasi telah memerangkap para pelaku dan pengelola pendidikan di negeri ini. Pro-kontra seputar BHP (Badan Hukum Pendidikan) dan BHMN (Badan Hukum Milik Negara), sesungguhnya terkait dengan komersialisasi. Status BHP atau BHMN yang memberikan kelonggaran penuh pada sekolah-kampus untuk menggali dana dari masyarakat dan menggandeng dunia bisnis-industri dapat dipandang sebagai tindakan pragmatis dalam menangani pendidikan. Dengan dalih pendidikan tanggungjawab bersama, pemerintah menutupi ketidakuannya merealisasikan Undang-undang yang menuntut 20 % APBN pendidikan.

Status BHP dan BHMN mungkin diterima bulat masyarakat jika penduduk Indonesia sejahtera, dan lembaga pendidikan sanggup menggalang dana secara kritis dan profesional. Masalahnya, pendapatan perkapita penduduk Indonesia masih 600 dolar (bandingkan dengan Amerika yang 30.000 dolar atau Singapura yang 20.000 dolar), kemampuan sekolah-sekolah dan kampus-kampus dalam menggalang dana masih amatiran. Sekolah dan kampus cenderung mengambil jalan mudah dengan menaikkan biaya pendidikan yang langsung membebani masyarakat. Pendirian sekolah-sekolah unggulan dengan biaya besar dan penerimaan mahasiswa “jalur khusus” adalah indikasi yang mengarah pada komersialisasi pendidikan yang dampaknya menyakiti orang miskin.

BHP dan BHMN sudah dicanangkan, respons dan kritik terus bermunculan. Sudah semestinya pemerintah, politikus, dan birokrat di pusat maupun di daerah, berhati-hati mengimplementasikan BHP dan BHMN di sekolah dan perguruan tinggi. Berkaitan dengan ini, perlulah mereka sejenak menengok sejarah dan belajar kepada para politikus dan pejabat negara di masa silam. Para politikus *father founding* dulu adalah politikus-intelektual yang mencintai pendidikan. Tjokroaminoto, Sutan Sjahrir, Mohammad Hatta, Soekarno, Mohammad Natsir, Agus Salim, dan Sjafruddin Prawiranegara adalah politikus-negarawan kelas dunia dan mencintai pendidikan. Hanya kepada penguasa, politikus, dan birokrat yang mencintai pendidikanlah, masyarakat akan menggantungkan harapannya dalam memperoleh pendidikan.

Selain kepada para penguasa, politikus, dan birokrat, masyarakat tentu juga menggantungkan harapan kepada pengelola lembaga pendidikan, baik di sekolah-kampus negeri maupun swasta. Sayangnya, mental dan dalih pengelola pendidikan umumnya juga pragmatis dan gampang. “*Daripada menunggu-nunggu dana dari pemerintah, mendingan langsung menggali dana dari masyarakat,*” begitulah kira-kira dalih pragmatis yang lalu diikuti tindakan komersialisasi. Mereka tidak menyadari, sementara mereka menggali dana dan masyarakat terhimpit, harta negara digasak orang-orang yang sama sekali tidak peduli pada rakyat dan pendidikan. Sudah menjadi pengetahuan umum, uang negara (uang rakyat) dikuras para pengusaha yang sesungguhnya adalah *maling*.



Komersialisasi pendidikan telah menjadi pengetahuan masyarakat. Seringkali sekolah-sekolah dan kampus-kampus menyajikan pelayanan tidak sepadan dengan uang sekolah yang mereka pungut. Di sekolah seperti ini, “laba” atau “selisih anggaran” tidak ditanamkan bagi infrastruktur pendidikan, melainkan untuk “memperkaya” pengelola pendidikan.¹² Itu sebabnya muncul potret ironis: para pengelola pendidikan hidup mewah, sarana dan fasilitas pendidikan yang dikelolanya mengkhawatirkan.

Demikianlah di bawah mental pragmatisme, arus deras kapitalisme global, manusia dan masyarakat tergelincir pada tindakan komersialisasi untuk mengejar citra dan gaya hidup penuh mimpi dan ilusi. Pada gilirannya sekolah dan kampus ikut-ikutan menempatkan diri sebagai “pabrik ijazah” yang memproduksi “komoditas ilmu” dalam logika bisnis-ekonomi. Sebagai produk modernisme dan kolonialisme, kapitalisme memiliki watak sama dengan imperialisme-kolonialisme yang menjajah dan menindas negeri-negeri dunia ketiga. Pertanyaannya, apakah lembaga dan para pengelola pendidikan akan membiarkan proses “penjajahan” kapitalisme yang menyebabkan pembendaan (*reifikasi*) manusia terus berlangsung? Apakah akan tega membiarkan masyarakat, terutama kaum miskin, ditindas berbagai hal yang membuatnya lumpuh tidak berdaya? Atau akan melakukan kritik, bahkan perlawanan, terhadap berbagai bentuk ketidakberesan itu!

Tanggung Jawab Pendidikan

Sejak awal mesti disadari bahwa lembaga pendidikan bukan lembaga bisnis atau ekonomi. Jika diselenggarakan pihak swasta, pengelolaan pendidikan selalu oleh yayasan, lembaga nir-laba yang tidak berorientasi pada keuntungan. Sayangnya, hampir semua yayasan pendidikan di negeri ini dikelola sebagai lembaga ekonomi dan menjadi ladang uang para pengelolanya. Lantas apakah sesungguhnya tugas dan tanggung jawab pendidikan? Bagaimana mengelola pendidikan sesuai tugas dan tanggung jawabnya?

Salah satu tugas pendidikan adalah melakukan perubahan, baik perubahan budaya, sosial, politik, ilmu dan teknologi, maupun taraf hidup ekonomi masyarakat. Semakin berhasil pendidikan, semakin besarlah perubahan yang diakibatkannya. Namun demikian, Arnold Anderson, guru besar Ilmu Pendidikan di University of Chicago, mengingatkan tidak semua perubahan harus langsung berdampak ekonomi. Pendidikan, demikian Anderson, bukan “ramuan ajaib” yang bisa cepat mengubah keadaan. Meskipun pendidikan mengajarkan keahlian mencari nafkah, mempersiapkan lulusan untuk bekerja, melatih calon pemimpin negara, tetapi pendidikan harus dilihat dalam konteks memelihara dunia intelektual secara luas.¹³

Dalam upaya menelusuri tujuan pendidikan, John Dewey menggariskan pendidikan progresif, pendidikan pragmatis yang mengutamakan kemampuan pelajar menyesuaikan diri dengan lingkungan. Akan tetapi, Max Rafferty mengkritik pendidikan progresif, kemudian menggulirkan “pendidikan mendalam” yang menuntut para pengajar-pelajar menguasai pengetahuan suatu bidang secara menyeluruh. Pendidikan yang mendalam menganut prinsip kesetaraan martabat antarbidang studi.



Dalam pendidikan ini, ilmu eksakta dan teknologi tidak lebih bagus atau buruk dibandingkan dengan ilmu sosial, sejarah, dan sastra.¹⁴

Mengikuti konsep Rafferty, pendidikan Indonesia sejak zaman Orde Baru melakukan kesalahan besar: *pertama*, terlalu mengarah pada teknologi terapan dan menomorduakan ilmu-ilmu murni; *kedua*, mengejar kepentingan ekonomi sehingga terlalu berorientasi pada uang dan pekerjaan. Akibatnya ilmu-ilmu murni tidak berkembang, cara pandang masyarakat terhadap pendidikan bersifat pragmatis, teknologi impor menjadikan kita sebagai bangsa pemakai-perakit, bukan bangsa pemikir dan pencipta.

Pendidikan selayaknya dipahami sebagai suatu “proses” meningkatkan “kualitas” sekaligus “membebaskan” manusia dari segala macam penjajahan, baik penjajahan kasat mata maupun tersembunyi, tetapi berjalan sistematis. “Proses” mensyaratkan adanya pemahaman-perilaku berkelanjutan, “kualitas” mensyaratkan peningkatan intelektual, emosional, spiritual manusia, “membebaskan” mensyaratkan kemerdekaan individu kreatif. Pendidikan yang menghargai manusia pastilah akan berorientasi pada kualitas hidup dan kebebasan manusia. Pendidikan yang tidak meningkatkan kualitas dan membebaskan manusia, apalagi sampai memerosotkan martabat manusia, tentu bukan praktik pendidikan sesungguhnya.

Masalahnya, di masyarakat kita berkembang anggapan simplifikasi terhadap pendidikan. Pendidikan dianggap sebatas pabrik ijazah, langkah untuk menjadi pegawai, mesin produksi uang, akhirnya “jalan tol” untuk menumpuk harta dan kekayaan. Anggapan itu tidak seluruhnya salah, jika senantiasa disadari bahwa lulusan pendidikan dapat menjadi ini dan itu karena mereka memiliki keterampilan, menguasai keahlian, memahami kemanusiaan, bersikap bebas, dan bertanggung jawab. Sekali lagi, tujuan pendidikan adalah meningkatkan kualitas, peradaban, kebudayaan, dan teknologi manusia, selain membebaskan mereka dari segala bentuk penindasan, sebagaimana dikatakan Paulo Freire.¹⁵ Jika pendidikan terlalu pragmatis dan diarahkan terhadap materi (komersialisasi), suatu hari manusia akan menyadari dan tidak tahu bagaimana memanfaatkan materi itu. Menurut Maynard Hutchins, pendidikan yang membentuk manusia menjadi materialistik tidak akan bisa menyelamatkan manusia dan peradaban.¹⁶

Harus disadari, kenyataannya pendidikan kita masih sebatas menghasilkan tukang-tukang terampil, perakir-perakit handal, orang-orang yang pintar mencari uang untuk dirinya sendiri, para pemakai teknologi (impor), engsel pabrik dan industri, dan bukan para pemikir atau pekerja yang bebas-merdeka, luas wawasan, dan menyadari tugas kemanusiaannya di muka bumi. Dalam kerangka kemanusiaan, Moh. Sjafei mengajukan 10 tujuan pendidikan yang relevan untuk bangsa Indonesia. Dari ke-10 itu, sifat kemanusiaan menempati urutan pertama di atas kecakapan, kecerdasan berpikir, kesejahteraan, demokrasi, dan masalah-masalah lainnya.¹⁷

Lantas bagaimana dengan perguruan tinggi? Perguruan tinggi kita sekarang sedang bergumul di antara hasrat untuk mengembangkan ilmu (penelitian) dan arus komersialisasi yang menggoda para pengelolanya. Mengikuti pemikiran Edward Shils, guru besar Sosiologi di Universitas Chicago, sebaiknya universitas di negara-negara dunia ketiga menjadi pusat-pusat penelitian. Jika tidak,



universitas akan gagal melahirkan peneliti-peneliti yang diperlukan untuk melakukan berbagai perubahan. Pengembangan penelitian itu harus berada dalam tradisi akademik yang baik. Tradisi akademik membutuhkan manusia-manusia berwatak intelektual yang kreatif.¹⁸

Dalam konteks tradisi akademik, yang dibutuhkan kita sekarang tentulah universitas yang mau serius mengembangkan riset. Sayangnya universitas riset (*research university*) seringkali dilihat dari segi kuantitas, dana riset, dan jumlah doktor yang dihasilkan. Menurut Rektor Universitas Indonesia, Gumilar R. Soemantri, pemahaman seperti itu terlalu dangkal karena riset sejatinya adalah “kultur akademik” (sejalan dengan “tradisi akademik” Edward Shils), bukan perkara kuantitatif. Jika perguruan tinggi mengembangkan riset, artinya perguruan tinggi itu sedang membangun kultur akademik. Kultur akademik merupakan langkah penting “menuju” cita-cita sebagai universitas riset.¹⁹

Universitas riset menjadi cita-cita banyak orang, baik pengelola, dosen, maupun masyarakat. Akan tetapi, tidak sedikit pengelola kampus pesimis menuju cita-cita itu karena alasan dana, sarana, dan kualifikasi tenaga akademik (doktor yang cerdas) tidak memadai. Kepesimisan itu dapat dipahami karena penelitian membutuhkan dana, sarana, dan manusia unggul. Namun demikian, jika mengikuti pandangan Edward Shils, cita-cita mewujudkan universitas riset sesungguhnya terletak pada upaya-upaya menciptakan kultur akademik dan mengubah mental para dosen. Dengan kata lain, hal itu terletak pada niat dan tekad yang didukung seluruh elemen perguruan tinggi, termasuk pemerintah.

Sekarang ini, beberapa kampus di Indonesia mengidentifikasi diri sebagai *entrepreneurial university*, konsep yang diyakini akan menumbuhkan sikap dan watak *entrepreneur* (pewirausaha) di kalangan civitas akademiknya. Identifikasi ini dipilih mengingat tenaga, dana, dan sarana yang dimiliki kampus-kampus tersebut masih amat terbatas untuk mengidentifikasi diri sebagai universitas riset. Dengan kata lain, *entrepreneurial university* dianggap sebagai peluang untuk menyiapkan dana dan prasarana. Suatu niat yang patut diapresiasi, meskipun tentu harus dikritisi.

Gagasan “universitas wirausaha” disambut suka cita oleh sebagian kalangan, meskipun sebagian lagi mengkritisi dan mempertanyakannya. Bagi mereka yang menyambut suka cita, *entrepreneurial university* adalah peluang dan tantangan untuk mengatasi berbagai masalah darurat di negeri ini: kemiskinan dan pengangguran, misalnya! Bagi mereka yang mengkritisi, bahkan mempertanyakan, gagasan *entrepreneurial university* bisa menjebak kampus menjadi lembaga pendidikan yang mengedepankan visi bisnis dan usaha. Dalam konteks ini, perilaku komersialisasi dikhawatirkan akan semakin menjadi dan spirit pendidikan terabaikan.

Konsep *entrepreneurial university* terbuka untuk didiskusikan, baik dari segi wacana maupun terutama implementasinya. Kampus yang mengidentifikasi diri sebagai *entrepreneurial university* harus bergumul serius sehingga Tridharma Perguruan Tinggi (*teaching, research, dan public services*) tetap menjadi spirit utama. Pergumulan terjadi karena konsep *entrepreneurial university* dibangun dua wacana berbeda, yakni “entrepreneur” dan “universitas”. Jika yang satu merujuk pada “jiwa bisnis” dalam ekonomi, yang kedua mengacu pada “jiwa ilmu” dalam pendidikan. Fokus pergumulan terletak pada keberadaan kampus sebagai lembaga pendidikan (keilmuan) yang dengan sendirinya tidak bisa



berpijak langsung pada logika ekonomi. “Dua jiwa” itu memiliki jaringan wacana dan kepentingannya sendiri-sendiri. Jika ilmu bersandar pada *falsifikasi* (meragukan) untuk kemudian memverifikasi kehidupan, bisnis menyandarkan diri pada prinsip keuntungan dan perluasan pasar ekonomi. Di titik inilah integrasi tidak gampang dilakukan.

Konsep *entrepreneurial university* bukan gagasan kosong tanpa pandangan dunia (*world vision*), bahkan “ideologi”, di balik wacana dan arah implementasinya. Sementara itu, kata Michel Foucault, tidak ada pengetahuan, konsep, atau “pandangan dunia” yang otonom dan bebas nilai dari kuasa yang membentuknya. Ketika membahas kaitan pengetahuan (*knowledge*) dan kekuasaan (*power*), Foucault menyimpulkan antara pengetahuan dan kekuasaan terdapat relasi yang saling memperkembangkan. Tidak ada pengetahuan tanpa kuasa di sebaliknya, tidak ada kuasa tanpa pengetahuan yang menyertainya. Pada titik radikal, sistem pengetahuan tidak terpisahkan dari mekanisme “penaklukan” yang menjadikan manusia “patuh dan berguna”.²⁰ Dalam alur pemikiran Foucault, kita akan sampai pada kesimpulan bahwa sebuah konsep tidak bisa dilepaskan dari jaringan wacana yang di dalamnya terdapat kekuasaan untuk menaklukan (*knowledge is power = language is power*).

Dalam sejarah hubungan Eropa-Amerika dengan negara-negara di dunia ketiga, Edward Said mencoba menerapkan pemikiran Foucault dan sampai pada kesimpulan bahwa sejarah dan sistem (ilmu) pengetahuan Eropa merupakan bagian dari wacana kolonialisme. Sekaitan dengan ini banyak studi membuktikan bahwa modernisme, kolonialisme, dan kapitalisme dengan rapi dan halus membungkam kuasa atau suara lain (*the other voice*), misalnya suara proletar, perempuan, dan negara-bangsa jajahan di dunia ketiga. Selain melalui kekuasaan politik dan kekuatan militer, dominasi kolonialisasi dan imperialisasi Barat terhadap Timur (negara-negara dunia ketiga) dilakukan melalui “pengetahuan” yang membentuk wacana kolonial. Sebagaimana dikatakan Patrick Williams dan Laura Chrisman dalam *Colonial Discourse and Post-colonial Theory* (1993), hubungan antara produksi pengetahuan (intelektual) wacana kolonial dengan dominasi global semakin meningkat.²¹ Dominasi produksi pengetahuan Barat terasa sekali dalam lembaga pendidikan kita. Dalam konteks pendidikan dan islamisasi ilmu, Seyyed Hossein Nasr melihat kerancuan dalam kurikulum pendidikan saat ini salah satunya disebabkan peniruan buta terhadap model-model pendidikan Barat.²²

Entrepreneurial university adalah konsep atau pengetahuan yang bersandar pada wacana (kuasa) tertentu, sebuah jaringan yang tidak gampang dikuak, apalagi direduksi. Dunia bisnis dewasa ini tidak terpisahkan dari laju kapitalisme dalam melipatgandakan produksi, konsumsi, modal, dan keuntungan. Sebagai wacana, kata “entrepreneur” bagaimanapun merupakan jaringan wacana kapitalisme yang rapi menyembunyikan kuasanya. Gagasan *entrepreneurial university* dapat dipandang sebagai strategi kapitalisme untuk memperkokoh kapitalisme itu sendiri. Itulah sebabnya kampus harus menyadari sepenuhnya bahwa aktivitas “entrepreneurial” tidak terlepas dari wacana kapitalisme. Dengan begitu, pengelola kampus akan berhati-hati mengimplementasikan *entrepreneurial university* sehingga tidak “mensubversi” spirit Tridharma Perguruan Tinggi. Jika tidak sanggup bergumul serius, perguruan tinggi akan lebih mantap mengidentifikasi diri sebagai *teaching university* (universitas pembelajaran) sambil



menuju *research university*. Berbeda dengan *entrepreneurial university*, gagasan *teaching university* tidak akan menimbulkan benturan dalam dirinya sendiri karena aktivitas pembelajaran inheren menjadi bagian tidak terpisahkan. Dengan kata lain, dalam konteks *teaching university*, perguruan tinggi tinggal mengokohkan pelaksanaan pembelajaran itu sendiri.

Masalahnya, apakah kesadaran pelaku dan pengelola pendidikan di perguruan tinggi sanggup mengontrol operasi pengetahuan, kuasa dan wacana kapitalisme yang menyusup ke berbagai lapisan, termasuk ke dalam konsep *entrepreneurial*? Jika kesadaran subjek dirinya ambrol, pada saat itulah pelaku-pengelola perguruan tinggi “takluk” dan dibuat “patuh dan berguna” dalam logika kapitalisme. Tentu terdapat peluang untuk mempertukarkan (memperseterukan) “kuasa ilmu” dengan “kuasa bisnis” secara setara sehingga menghasilkan kerjasama “saling menguntungkan” jika pelaku- pengelola pendidikan memiliki kesadaran penuh sekaligus memahami betul jaringan halus kapitalisme.

Seorang entrepreneur adalah orang yang peka dengan bisnis, entah itu entrepreneur di wilayah politik, sosial, keagamaan, kebudayaan, dan tentu saja pendidikan. Para politikus kita yang kini erat bergandengan dengan pengusaha pada dasarnya adalah “*politikus-entrepreneur*”. Oleh karena itu, kegiatan politiknya dilakukan dengan selera dan kepekaan seorang entrepreneur, di mana uang mereduksi kegiatan politik sebatas kegiatan ekonomi, maka dalam dunia pendidikan patut kita bertanya, apakah kampus akan sanggup mendialogkan jiwa ilmu di tengah lalu lintas “godaan” komoditas kapitalisme? Atau, seperti halnya “*politikus-entrepreneur*”, pelaku-pengelola pendidikan akan terseret ke dalam arus kapitalisme yang membuatnya mengkomoditaskan pendidikan?

Demikian sejumlah pertanyaan yang harus digumuli serius dalam memahami dan mengimplementasikan gagasan *entrepreneurial university*. Sebaliknya, kampus harus *istiqamah* mempertajam spirit Tridharma Perguruan Tinggi. Itu artinya kampus senantiasa mengupayakan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat sepenuh kesadaran. Kampus harus berani mempertanyakan “kemapanan sesat di jalan salah” yang terjadi setakat ini, sebagaimana Ivan Illich mempertanyakan sekolah-sekolah formal di Amerika Latin dalam konteks merayakan kesadaran. Erich Fromm menyebut apa yang dilakukan Illich sebagai “radikalisme humanistik”, di mana keraguan terhadap praktik pendidikan merupakan proses membebaskan diri dari behala pemikiran, sekaligus memperluas kesadaran, memperdalam visi kreatif dan imajinatif terhadap berbagai kemungkinan pilihan untuk bertindak.²³

Dalam upaya mengikis sikap pragmatis-materialistik yang seiring sejalan dengan perilaku komersialisasi pendidikan, para pelaku-pengelola pendidikan sudah sepatutnya melakukan “gerakan penyadaran”. Dalam konteks itulah, Kuntowijoyo menggulirkan gagasan “pendidikan perubahan”.²⁴ Gagasan yang bertumpu pada kesadaran itu mengajak para pengelola-pelaku pendidikan dan masyarakat untuk mengkritisi “politikasi dan komersialisasi” pendidikan dan kebudayaan. Dalam gerakan itu, semestinya pendidikan menempatkan diri sebagai wahana yang memperjuangkan kualitas berbagai aspek kehidupan, sekaligus membebaskan manusia dari aneka macam penindasan, baik kasat mata maupun halus tersembunyi dalam jaringan wacana. Segala dalih kekuasaan (politik atau bisnis)



yang akan merendahkan eksistensi lembaga pendidikan (karena menjadi lembaga ekonomi) dan martabat manusia (karena menyebabkan dehumanisasi) harus dibongkar sampai ke akar wacananya yang paling halus dan tersembunyi.

Pada akhirnya harus ditegaskan pendidikan yang menghargai manusia memiliki tanggung jawab untuk memanusiakan manusia (*humanisasi* atau *amar ma'ruf*), membebaskan manusia (*liberasi* atau *nahyi munkar*), dan meruhanikan manusia (*transendensi* atau *tu'minuna billah*),²⁵ baik dalam perilaku sosial, politik, ekonomi, budaya, dan pendidikan. Jika pendidikan berhasil mewujudkan tanggung jawab tersebut, dengan sendirinya mental pragmatis-komersialis dalam dunia pendidikan akan lenyap. Artinya, ilmu, teknologi, uang, dan harta (material) akan ditempatkan sebagai instrumen dan bukan orientasi, apalagi tujuan sebagaimana tampak pada logika kapitalisme.

Penutup

Mental pragmatis yang berlandas filsafat pragmatisme telah menghinggapi mental manusia dan masyarakat Indonesia. Pada gilirannya, seiring laju kapitalisme global, sikap pragmatis turut mendukung munculnya komersialisasi pendidikan yang mengkhianati hakikat pendidikan, sekaligus menyakiti perasaan orang-orang miskin. Pendidikan kemudian menjadi bagian dari struktur negara sekaligus bagian dari industri kapitalisme yang cenderung menindas orang lemah dan membendakan manusia. Di titik ini dunia pendidikan, baik sekolah maupun perguruan tinggi, harus melakukan pergumulan serius agar pendidikan tetap berpijak pada landasan pendidikan itu sendiri. Tugas dan tanggung jawab pendidikan terletak pada upaya-upaya memanusiakan manusia (*humanisasi*), membebaskan manusia (*liberasi*), dan meruhanikan manusia (*transendensi*). Semua gagasan dan tindakan yang cenderung melenyapkan nilai-nilai kemanusiaan, seperti tampak pada (neo)-kolonialisme-(neo)-imperialisme kapitalisme, harus dipertanyakan sampai ke akar wacananya. Gerakan penyadaran perlu diaktualkan di sekolah dan perguruan tinggi agar tanggung jawab pendidikan senantiasa berpijak pada semangat dan landasan pendidikan itu sendiri.

Endnote

- ¹ Azyumardi Azra, *Esei-esei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998), hal. 109-111.
- ² Soni Keraf, *Prngmatisme Menurut William James* (Yogyakarta: Kanisius, 1987), hal. 35.
- ³ Haniah, *Agama Pragmtis: Telaah atas Konsepsi Agama John Dewey* (Magelang: Indonesiatera, 2001), hal. 23.
- ⁴ Kuntowijoyo, *Islam Sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika* (Bandung: Teraju Mizan, 2004), hal. 5.
- ⁵ Ania Loomba, *Colonialism-Poscolonialism* (New York: Rouledge, 2000), hal. 29.
- ⁶ Dawam Rahardjo, *Tantangan Indonesia Sebagai Bangsa* (Yogyakarta: Ull Press, 1999), hal. 133-135.
- ⁷ Yasraf A. Pilliang, *Hiper-Realitas Kebudayaan* (Yogyakarta: LKIS, 1999), hal. 88-89 dan 99-102.
- ⁸ Ross Poole, *Moralitas dan Modernitas di Bawah Bayang-bayang Nihilisme* (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hal. 190.
- ⁹ Ania Loomba, *Colonialism*.
- ¹⁰ Frantz Fanon, *The Wretched of The Earth: The Handbook for The Black Revolution That is Changing The Shape of The World* (New York: Grove Press, 1963), hal 78-80.



¹¹ Laut dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya tidak lagi dapat dipandang semata urusan pertahanan dan ekonomi, melainkan telah menjadi masalah kebudayaan. Oleh karena itu, sejumlah seniman dan budayawan (Rendra, Eep Saepullah Fatah, Agus R. Sarjono, Arie F. Batubara, dll.) pada 14 Juni 2005 mendeklarasikan "Manifesto Kebudayaan" untuk menyelamatkan laut kita.

¹² Mochtar Buchori, "Komersialisasi Idealisme Bukan Tabu", dalam *Jurnal Basis* Januari-Februari 1998, hal. 44

¹³ Myron Weiner, *Modernisasi Dinamika Pertumbuhan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1994), hal. 20-32.

¹⁴ Rafferty dalam Freire, *Menggugat Pendidikan: Fundamental, Konservatif, Liberal, Anarkis* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal. 65.

¹⁵ Sri Murtiningsih, *Pendidikan Alat Perlawanan: Teori Pendidikan Paulo Freire* (Yogyakarta: Resist Book).

¹⁶ Paulo Freire, *Menggugat*, hal. 127.

¹⁷ A.A. Navis, *Filsafat dan Strategi Pendidikan M. Sjafei* (Jakarta: Grasindo, 1996), hal. 215.

¹⁸ Myron Weiner, *Modernisasi*.

¹⁹ Lihat artikel Indira Permanasari di *Kompas*, 26 Februari 2005 tentang pendidikan tinggi "Membangun Tradisi Akademik di Kampus."

²⁰ Michel Foucault, *Disiplin Tubuh*, hal. 30 & 158.

²¹ Patrick Williams & Laura Chrisman (ed.), *Colonial Discourse and Post-colonial Theory: A Reader* (Maylands Avenue: Harvester-Wheatsheaf, 1973), hal. 7.

²² Lihat pengantar Seyyed Hossein Nasr dalam buku *Hierarki Ilmu: Membangun Rangka Pikir Islamisasi Ilmu* yang ditulis Osman Bakar (Bandung: Mizan, 1997), hal. 11-14.

²³ Ivan Illich, *Celebration of Awareness: A Call for Institutional Revolution* (Morelos: Pantheon Books, 1969).

²⁴ Kuntowijoyo, *Selamat Tinggal Mitos, Selamat Datang Realitas* (Bandung: Mizan, 2002), hal. 65.

²⁵ Konsep *humanisasi, liberasi, dan transendensi* saya pinjam dari pemikiran ilmu sosial dan sastra profetik yang sekian lama digagas Kuntowijoyo. Meskipun tiga konsep itu digunakan Kuntowijoyo dalam konteks ilmu dan kebudayaan secara luas, tetapi tidak mustahil digunakan pula dalam konteks dunia pendidikan. Itu sebabnya saya mencoba menerapkannya dalam tulisan ini karena tugas dan tanggung jawab pendidikan pada dasarnya sama dengan tugas dan tanggung jawab kebudayaan dan manusia di muka bumi ini. Lihat lebih jauh Kuntowijoyo, *Islam sebagai Ilmu*.

Daftar Pustaka

- Azra, Azyumardi. 1998. *Esei-esai Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Bakar, Osman. 1997. *Hierarki Ilmu: Membangun Rangka Pikir Islamisasi Ilmu*. Bandung: Mizan.
- Buchori, Mochtar. 1998. "Komersialisasi Idealisme Bukan Tabu" dalam *Jurnal Basis*, Januari-Februari 1998.
- Fanon, Frantz. 1963. *The Wretched of The Earth: The Handbook for The Black Revolution That is Changing The Shape of The World*. New York: Grove Press.
- Foucault, Michel. 1997. *Disiplin Tubuh: Bengkel Individu Modern*. Terj. PetrusSunu Hardiyanta. Yogyakarta: LKIS.
- Freire, Paulo, dkk. 2003. *Menggugat Pendidikan: Fundamental, Konservatif, Liberal, Anarkis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Haniah. 2001. *Agama Pragmatis: Telaah atas Konsepsi Agama John Dewey*. Magelang: Indonesiatara.
- Illich, Ivan. 1969. *Celebration of Awareness: A Call for Institutional Revolution*. Morelos: Pantheon Books.
- Keraf, Soni. 1987. *Pragmatisme Menurut William James*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kuntowijoyo. 2002. *Selamat Tinggal Mitos, Selamat Datang Realitas*. Bandung: Mizan.
- . 2004. *Islam Sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika*. Bandung: Teraju Mizan.



- Loomba, Ania. 2000. *Colonialism/ Postcolonialism*. New York: Routledge.
- Murtiningsih, Siti. 2004. *Pendidikan Alat Perlawanan: Teori Pendidikan Paulo Freire*. Yogyakarta: Resist Book.
- Navis, A.A. 1996. *Filsafat dan Strategi Pendidikan M. Sjafei*. Jakarta: Grasindo.
- Permanasari, Indira. 2005. "Membangun Tradisi Akademik di Kampus" dalam *Kompas* edisi 26 Februari 2005.
- Piliang, Yasraf Amir. 1999. *Hiper-Realitas Kebudayaan*. Yogyakarta: LKIS.
- Poole, Ross. 1993. *Moralitas dan Modernitas di Bawah Bayang-bayang Nihilisme*. Yogyakarta: Kanisius.
- Rahardjo, Dawam. 1999. *Tantangan Indonesia Sebagai Bangsa*. Yogyakarta: Ull Press.
- Weiner, Myron (Ed.). 1994. *Modernisasi Dinamika Pertumbuhan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Williams, Patrick & Laura Chrisman (ed.), 1973. *Colonial Discourse and Post-colonial Theory: A Reader*, Maylands Avenue: Harvester-Wheatsheaf.